

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

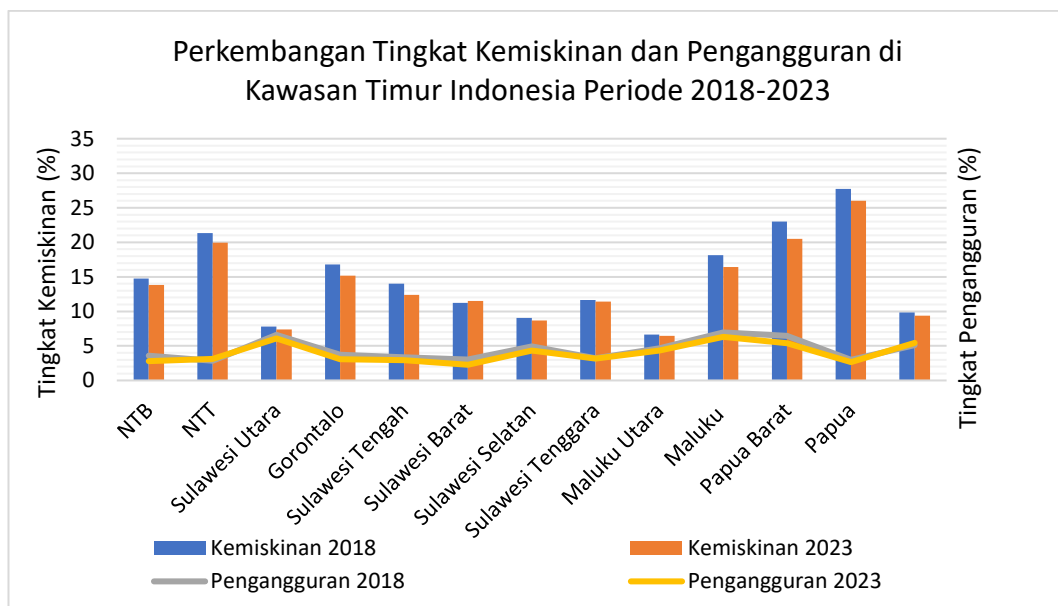
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang mampu menghambat proses pembangunan suatu negara. Menurut Nurkse, siklus kemiskinan menandakan adanya interaksi yang kompleks dari berbagai faktor yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, yang mengakibatkan kemiskinan yang terus menerus terjadi di suatu negara (Anwar *et al.*, 2024). Menurut *World Bank*, kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang atau kelompok yang tidak memiliki pilihan dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya (Ningrum *et al.*, 2020).

Kemiskinan di Indonesia adalah salah satu tantangan dalam bidang ekonomi, sehingga diperlukan solusi atau kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan indikator keberhasilan program pembangunan ekonomi adalah ketika pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan (Amri, 2022). Target tingkat kemiskinan setiap tahun ditentukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah menetapkan target tingkat kemiskinan nasional dalam kisaran 8,5 persen hingga 9 persen. Namun, target ini kemudian ditingkatkan pada tahun 2023 menjadi 7,5 persen hingga 8,5

lahmud *et al.*, 2024).



Seiring dengan perbedaan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran di seluruh provinsi di kawasan timur Indonesia juga relatif berbeda. Perbedaan tingkat pengangguran tersebut bukan hanya terjadi antar provinsi, tetapi juga pada provinsi yang sama pada periode tahun yang berbeda. Berikut ini gambaran mengenai tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di seluruh provinsi kawasan timur Indonesia selama periode tahun 2018 hingga tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2023 (data diolah)

Gambar 1. 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kawasan Timur Indonesia Periode 2018-2023

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup signifikan di kawasan timur Indonesia selama periode 2018-2023. Semestinya, tingkat pengangguran yang rendah berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Namun realitanya, terdapat provinsi-provinsi dengan tingkat pengangguran yang rendah tetapi tingkat kemiskinannya tinggi.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di kawasan timur Indonesia akan adanya tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Amri, 2022).



Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berkaitan dengan penurunan kemiskinan, pemerintah melakukan intervensi pada kebijakan fiskal melalui alokasi belanja pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian agar tidak menyimpang dari kondisi yang diinginkan (Akhmad *et al.*, 2022). Hal ini selaras dengan teori *Keynesian Economic*, terkait dengan campur tangan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian. Keynes memandang bahwa komponen pengeluaran, termasuk belanja pemerintah akan menghasilkan *multiplier effects*. Instrumen kebijakan fiskal secara umum digunakan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan serta penurunan tingkat kemiskinan (Mahmud *et al.*, 2024).

Selain melakukan intervensi pada kebijakan fiskal, pemerintah juga melakukan intervensi pada kebijakan moneter melalui lembaga keuangan dengan menyalurkan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal tersebut dilakukan karena kurangnya akses permodalan seringkali menjadi penghambat perkembangan UMKM. Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2023, UMKM adalah sektor yang memiliki kontribusi yang besar, terbukti dengan adanya 64,3 juta unit usaha dan mampu menyumbang sekitar 61,95 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap pembiayaan seringkali menjadi penyebab terjerumusnya masyarakat untuk mengambil pinjaman dari rentenir atau pinjaman online disertai tingkat bunga yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian

nya, pemerintah membuat program KUR (Akhmad *et al.*, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian Manzoor dan Chikwira, di



mana penyaluran kredit tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha, tetapi juga pada perbaikan tingkat kesejahteraan yang pada gilirannya nanti dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Amri, 2022).

KUR dirancang untuk memudahkan akses pembiayaan yang mendorong perkembangan UMKM. KUR adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyaluran kredit ini dilakukan oleh lembaga perbankan, sehingga nantinya prosedur peminjaman harus sesuai dengan mekanisme perbankan. KUR hadir dengan tujuan memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

KUR merupakan salah satu program pemerintah yang menggunakan skema subsidi bunga dan telah diluncurkan sejak 2007. Namun, data dari Pusat Investasi Pemerintah menunjukkan bahwa pada tahun 2017, terdapat 44.582.840 unit UMKM atau 70,73 persen dari total UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan KUR (Hia *et al.*, 2021). Rendahnya tingkat jangkauan KUR terhadap UMKM disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak usaha mikro yang dianggap tidak cukup layak untuk memperoleh layanan perbankan. Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan. Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program kredit dengan skema dana bergulir pada tahun 2017, yang ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program yang menyediakan fasilitas bagi usaha ultra mikro melalui pembiayaan konvensional

biayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mempermudah akses pembiayaan yang cepat dan mudah, sehingga diharapkan dapat



meningkatkan jumlah wirausaha yang mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berfungsi sebagai program pendukung untuk KUR dan ditujukan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Diharapkan dampak dari program KUR dan pembiayaan UMi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat (Hia *et al.*, 2021).

Menurut data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR dan pembiayaan UMi mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan jumlah penyaluran kredit terbesar di kawasan timur Indonesia, baik itu penyaluran KUR maupun pembiayaan UMi. Pada tahun 2023, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan sebesar Rp.275,02 Miliar dengan jumlah pembiayaan UMi sebesar Rp.88,20 Miliar. Sementara itu, pada tahun yang sama, Maluku Utara menjadi provinsi dengan jumlah penyaluran kredit terkecil, dengan penyaluran KUR sebesar Rp.7,5 Miliar dan jumlah pembiayaan UMi sebesar Rp.2,4 Miliar.

Penelitian ini memilih periode 2018 hingga 2023 untuk mengevaluasi dampak program setelah satu tahun implementasi yang telah terdistribusi di seluruh Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Meskipun Kawasan Timur Indonesia terdiri dari 16 provinsi, empat provinsi lainnya yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya tidak termasuk dalam penelitian ini karena

entuk pada tahun 2022. Pengecualian empat provinsi tersebut didasarkan erbatasan data dan ketidaksesuaian dengan rentang waktu penelitian.



Sehubungan dengan penyaluran KUR dan pembiayaan UMi, tujuan utama dari program keuangan mikro adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Akses ke keuangan mikro telah berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Etiopia, terutama di kalangan perempuan (Aluko *et al.*, 2023). Perempuan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan anak-anak mereka, terutama di wilayah pedesaan di mana program keuangan mikro beroperasi. Kredit mikro dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, dan memperluas akses pendidikan dasar bagi semua.

Penelitian terkait pengaruh belanja pemerintah dan KUR di Indonesia telah banyak diteliti sebelumnya. Namun, hasil penelitian belum menunjukkan arah dan kesimpulan yang sama. Sementara itu, sejauh ini penggunaan variabel pembiayaan UMi belum banyak diteliti karena program ini diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2017, sehingga akses data yang tersedia masih terbatas. Menurut Mahmud *et al.*, (2024), belanja pemerintah memberikan dampak positif secara langsung dan tidak langsung bagi penurunan tingkat kemiskinan baik di daerah maupun secara nasional. Selanjutnya, menurut Luan & Bauer (dalam Amri, 2022) penyaluran kredit UMKM berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan pengangguran sebagai variabel perantara. Penambahan variabel ini didasari pada dugaan bahwa belanja pemerintah, penyaluran KUR, dan pembiayaan UMi berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran. Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu kemiskinan. Pengangguran selalu menjadi fokus kinerja pemerintah

jadi perhatian dari tahun ke tahun (Juniarto & Muchlisoh, 2019). Menurut *et al.*, (2018), dampak pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan



dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi, termasuk ketersediaan lapangan kerja. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah yang efektif dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar yang penting dalam mengurangi kemiskinan.

Sebaliknya, pengangguran tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dengan meningkatkan risiko kemiskinan dalam masyarakat (Amri, 2022). Oleh karena itu, kebijakan publik perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Nanga (2001) memandang bahwa pengangguran berdampak terhadap individu dan masyarakat maupun perekonomian karena pengangguran menyebabkan masyarakat tidak mampu mengoptimalkan kesejahteraan yang mungkin saja dicapainya. Sehingga, apabila kesejahteraan masyarakat rendah maka akan memicu permasalahan sosial lainnya, seperti kemiskinan dan ketimpangan (Manguma *et al.*, 2023). Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, pokok-pokok masalah yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran?
2. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kemiskinan baik a langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran?



3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran?
4. Apakah penyaluran KUR berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran?
5. Apakah pembiayaan UMi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja barang dan jasa terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran KUR terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan UMi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

aruh belanja pemerintah, penyaluran KUR dan pembiayaan UMi terhadap
iskin di kawasan timur Indonesia. Hal ini akan mengisi kesenjangan



pengetahuan dan memberikan wawasan baru terkait efektivitas program pemerintah tersebut terhadap masalah pengangguran dan kemiskinan di Kawasan timur Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, mahasiswa, dosen, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang relevan dan sebagai bahan pembandingan antara penelitian sebelumnya dan penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada pihak terkait dalam merancang program untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran di Kawasan timur Indonesia.

3. Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran di Kawasan timur Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Kemiskinan

Teori-teori tentang kemiskinan secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua paradigma besar, yaitu Neo-Liberal dan Demokrasi Sosial. Kedua paradigma ini menunjukkan perbedaan dalam hal konseptualisasi kemiskinan dan solusi yang diusulkan untuk mengentaskan kemiskinan. Berikut ini kedua paradigma tersebut.

1. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini, individu dan mekanisme pasar bebas adalah komponen penting yang menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan masalah individu yang merupakan hasil dari pilihan-pilihan individu. Menurut Syahyuti, kekuatan pasar menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan karena kekuatan pasar yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghilangkan kemiskinan (Febrianti, 2017). Strategi penanggulangan kemiskinan pada pendekatan ini bersifat temporer dengan peran negara yang sangat minim yang hanya dilakukan ketika institusi yang ada di masyarakat sudah tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma ini digerakan oleh *World Bank* dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Menurut *World Bank* kemiskinan adalah keadaan di mana seorang atau kelompok yang tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani n yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri, dan oleh sesamanya (Huda & Karsudjono, 2021).



Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selanjutnya, dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Menurut Satterthwaite (dalam Febrianti, 2017), kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan. Akibatnya, berbagai bentuk kemiskinan yang ada di masyarakat kurang mendapat perhatian. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kemiskinan. Meskipun demikian, pendekatan kemiskinan ini lebih mudah untuk dianalisis dan diukur, serta perbaikan yang ditargetkan pada tingkat individu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengalami kemiskinan.

2. Paradigma Sosial Demokrasi

Paradigma ini memandang kemiskinan sebagai masalah struktural, yang tercipta dari ketidakadilan dan ketimpangan serta keterbatasan akses tertentu yang di dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Bagi pendekatan ini, kemiskinan harus ditangani dengan intervensi negara melalui beberapa program pengentasan kemiskinan.

Kelemahan teori ini adalah ketergantungan tinggi pada negara untuk membangun struktur dan institusi yang dapat mengatasi kemiskinan, yang ya juga bergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Selain itu, aan kemiskinan relatif menyulitkan penetapan standar kebutuhan karena



tidak berfokus pada kebutuhan minimum, melainkan pada rata-rata kemampuan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa akar penyebab kemiskinan tidak hanya terletak pada kemampuan individu, tetapi juga pada bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat membatasi akses kelompok tertentu, sehingga penting untuk memastikan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

3. Paradigma Keberfungsian Sosial

Paradigma ini lahir untuk melengkapi celah pada paradigma neo-liberal dan paradigma sosial demokrasi. Paradigma ini menitikberatkan pada cara individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berfokus pada kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Paradigma keberfungsian sosial diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Baker *et al.*, (dalam Febrianti, 2017), yang menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Paradigma ini dapat memberikan gambaran yang lebih realistis dan komprehensif tentang karakteristik dan dinamika kemiskinan. Melalui paradigma ini, dapat dipahami bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi masalah sosial-ekonomi yang terkait dengan kondisi kemiskinan mereka. Paradigma keberfungsian sosial adalah yang paling tepat untuk mengatasi kemiskinan karena ia melihat kemiskinan sebagai masalah yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemampuan individu dan partisipasi masyarakat dalam mencari solusi. Dengan menghubungkan perspektif struktural dan peran aktif masyarakat, paradigma ini

lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab kemiskinan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.



Kontribusi penting lainnya dalam teori kemiskinan datang dari teori Nurkse (dalam Kuncoro, 2000), kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan perbedaan akses dan modal. Hal ini bermuara pada konsep Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*). Konsep ini tercipta akibat faktor-faktor yang menghalangi pembentukan modal. Di sisi lain, pembentukan modal tersebut diperoleh melalui tingkat tabungan yang tersedia.

Menurut Suman (dalam Lalaun & Siahaya, 2021), ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu penawaran modal dan permintaan modal. Pertama, penawaran modal, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat disebabkan oleh produktivitas yang minim, sehingga kemampuan untuk menabung juga terbatas dan pembentukan modal menjadi rendah. Kondisi ini berdampak pada kekurangan barang modal di negara tersebut yang mengakibatkan tingkat produktivitas tetap berada dalam posisi rendah. Kedua, terkait dengan permintaan modal, minat untuk berinvestasi di negara-negara miskin juga cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya luas pasar untuk berbagai jenis barang, ditambah dengan rendahnya pendapatan masyarakat yang berakar dari produktivitas yang rendah.

Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat, yang kemudian berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi hingga berakibat pada keterbelakangan. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse menyatakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Sementara itu, Suman (2006) menawarkan beberapa solusi untuk memutus lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, seperti mengoptimalkan potensi kekayaan alam, meningkatkan

itas tenaga kerja, mendorong masyarakat untuk menabung dan akan pinjaman untuk modal usaha.



Upaya memutus lingkaran kemiskinan dengan menyediakan pinjaman modal usaha pernah dilakukan oleh Muhammad Yunus, pelopor lahirnya Grameen Bank, yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Menurut Yunus (dalam Lalaun & Siahaya, 2021), pemahaman tentang masalah kemiskinan seharusnya berasal dari pengalaman langsung para penyintas. Banyak orang yang keliru dalam memaknai kemiskinan, mengaitkannya dengan kesejahteraan yang dianggap bergantung pada keterampilan yang dimiliki. Berdasarkan pemikiran ini, pemberi modal cenderung tidak memberikan pinjaman kepada individu yang tidak terampil, kecuali mereka memperoleh pelatihan terlebih dahulu. Namun, bagi Yunus, pandangan ini tidak tepat, karena yang dibutuhkan oleh individu dalam kesulitan adalah modal awal untuk memulai usaha, bukan keterampilan.

2.1.2 Teori Pengangguran

Menurut Sukirno (1994) pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Sementara itu, menurut Mankiw (2000), pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung. Kehilangan pekerjaan bagi sebagian orang berarti penurunan standar kehidupan, sehingga mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan



dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini, pengangguran mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga memicu diskusi yang mendalam mengenai solusi ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Lalaun & Siahaya, 2021).

Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merujuk pada tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Jenis pengangguran ini terjadi individu tersebut telah berusaha maksimal untuk mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil atau mereka yang malas mencari atau tidak ingin bekerja.

2. Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung terjadi ketika terdapat terlalu banyak tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, sehingga meskipun jumlah pekerja dikurangi, produksi tetap tidak terpengaruh. Selain itu, pengangguran terselubung juga dapat muncul ketika seseorang bekerja di posisi yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, yang mengakibatkan kinerja yang tidak optimal.

3. Setengah Menganggur

Setengah menganggur merujuk pada tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memiliki pekerjaan untuk sementara waktu. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari.



enurut pandangan Adam Smith dan David Ricardo dalam teori Klasik, juran mampu dicegah melalui penawaran dan mekanisme harga dalam

pasar bebas. Ketika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, pasar akan menyesuaikan penurunan upah. Meskipun ini dapat mengurangi pengangguran, penurunan upah juga berpotensi menurunkan produksi perusahaan. Dengan membiarkan pasar beroperasi tanpa intervensi, harga dan upah akan beradaptasi untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan, sehingga diharapkan pasar yang efisien dapat menyerap seluruh penawaran tenaga kerja meskipun penyesuaian upah berdampak pada produksi (Tamba *et al.*, 2023).

Berlawanan dengan teori Klasik, menurut teori Keynesian, pengangguran terjadi sebagai akibat dari permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi (Tamba *et al.*, 2023). Sementara itu, peningkatan jumlah tenaga kerja akan mengakibatkan penurunan upah yang pada gilirannya justru merugikan masyarakat karena berimplikasi pada berkurangnya daya beli terhadap barang dan jasa. Akibatnya, produsen akan menghadapi kerugian dan kesulitan dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, Teori Keynes mendorong perlunya intervensi pemerintah untuk menjaga tingkat permintaan agregat demi menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Menurut Sukirno (2004) dampak negatif dari meningkatnya angkatan kerja dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Penurunan ini mengurangi kemakmuran individu dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semakin rendahnya tingkat kemakmuran akibat pengangguran meningkatkan risiko masyarakat terjerumus ke dalam kemiskinan. Ketika banyak individu kehilangan pekerjaan, daya beli mereka menurun, mengurangi kemampuan untuk memenuhi

n dasar. Pengangguran tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga ak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat (Budhijana, 2020).



2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto (Ningrum *et al.*, 2020) teori pengeluaran pemerintah secara makro dikemukakan oleh tiga ahli ekonomi yang berbeda yaitu:

1. Rostow dan Musgrave

Perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, proporsi investasi pemerintah terhadap total investasi cukup besar karena pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selanjutnya, pada tahap menengah, investasi pemerintah masih dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat berkembang, namun peran investasi swasta mulai semakin meningkat. Di tahap lanjut, fokus pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah berpindah dari penyediaan infrastruktur ke pengeluaran untuk kegiatan sosial, seperti program kesejahteraan bagi lanjut usia dan pelayanan kesehatan masyarakat (Fattah, *et al.*, 2022).

2. Adolf Wagner

Adolf Wagner menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian akan sejalan dengan peningkatan relatif pengeluaran pemerintah. Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya peran pemerintah dalam mengelola berbagai aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan (Suherman, *et al.*, 2024).

3. Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi terhadap , yaitu sejauh mana mereka dapat menerima besarnya pungutan yang ukan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Dengan demikian,



masyarakat menyadari bahwa pemerintah memerlukan dana untuk menjalankan aktivitasnya, yang membentuk kesediaan mereka untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini menjadi batasan bagi pemerintah dalam meningkatkan pungutan pajak secara sembarangan (Suherman, *et al.*, 2024).

Dalam konteks perekonomian modern, Dumairy (1996) mengelompokkan peran pemerintah menjadi beberapa kategori. Pertama, alokatif, yaitu peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kedua, distributif, yang merujuk pada tanggung jawab pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Ketiga, stabilisatif, mencakup usaha pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian dan memulihkannya ketika mengalami ketidakseimbangan. Terakhir, dinamisatif, yaitu peran pemerintah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi agar dapat tumbuh, berkembang, dan maju dengan lebih cepat. Menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai berbagai kegiatan alam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja pemerintah tersebut mencakup pengeluaran yang digunakan untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi.

Hal ini diperkuat oleh gagasan Keynes yang dikutip dalam (Hardana *et al.*, 2023) bahwa pengeluaran pemerintah, termasuk belanja pemerintah dapat meningkatkan kesempatan kerja. Ini berlawanan dengan teori klasik yang mengemukakan bahwa kesempatan kerja adalah tingkat output dan harga

angan hanya bisa dicapai jika perekonomian berada pada tingkat tan kerja penuh (*full employment*). Sementara itu, menurut Keynes,



keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) tidak akan bisa dicapai melalui mekanisme pasar bebas semata, mesti di dorong dengan pengeluaran pemerintah. Sehingga hadirnya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas dengan intervensi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah dapat menstimulan masuknya investasi dan meningkatkan kesempatan kerja (Ginting & Sondang, 2019).

Menurut Mangkoesoebroto (dalam Sitanggang *et al.*, 2024), belanja pemerintah mencerminkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pengeluaran tersebut menunjukkan biaya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

Belanja ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai pemerintah. Belanja pegawai merupakan salah satu komponen penting dalam belanja pemerintah karena berhubungan langsung dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa mencakup pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah. Ini termasuk keperluan pengadaan alat, bahan, dan layanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk investasi dalam aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan as pelayanan publik. Belanja modal sangat penting untuk mendukung mbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang.



2.1.4 Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang bersangkutan yang mengharuskan pssihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang (Zuhri, 2019). Kredit adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk meminjam uang guna membeli barang, yang kemudian harus dikembalikan dalam periode waktu tertentu beserta bunga (Marsuki, *et al.*, 2022).

Menurut Bank Indonesia, kredit UMKM mencakup seluruh penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dalam rupiah maupun valuta asing. Penyediaan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank pelapor dan pihak lain, baik bank maupun bukan bank, yang memenuhi kriteria usaha yang ditetapkan. Sementara itu, menurut UU No. 20 Tahun 2008, kredit UMKM didefinisikan sebagai penyediaan dana yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (dalam Sedyastuti, 2018), klasifikasi jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh suatu usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

1. Usaha Mikro: Maksimal Rp. 50 juta untuk aset dan Rp. 300 juta untuk omset.
2. Usaha Kecil: Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta untuk aset dan Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 miliar untuk omset.



a Menengah: Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar untuk aset dan Rp. 2,5 hingga Rp. 50 miliar untuk omset.

2.1.4.1 . Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM berupa kebijakan pemberian kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha/kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan belum memadai (Ulfa & Mulyadi, 2020). KUR adalah upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM.

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa usaha mikro yang berhak menerima fasilitas penjaminan harus merupakan usaha produktif yang layak untuk mendapatkan kredit dari bank seperti seperti, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Model Ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank lainnya.

Pemerintah memfokuskan penyaluran kredit KUR kepada UMKM karena memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Implementasi KUR telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Melalui situs resmi Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa jutaan pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal kini dapat memperoleh pembiayaan. Hal ini meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Selain itu, KUR

tingkatkan daya saing produk lokal, menciptakan lapangan kerja, dan
u mengatasi kemiskinan.



Meskipun program KUR memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya tidak luput dari tantangan. Penyaluran KUR masih belum merata, dengan kesenjangan yang signifikan terlihat di daerah-daerah terpencil. Terbukti bahwa masih ada UMKM di daerah pedesaan yang belum mendapatkan informasi atau akses yang memadai terhadap program ini. Selain itu, literasi keuangan yang rendah dan prosedur administrasi yang rumit juga menjadi hambatan tambahan dalam pelaksanaan KUR. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintensifkan upayanya dalam menyebarluaskan informasi mengenai KUR, dengan fokus khusus pada daerah-daerah terpencil, dalam rangka memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dari para pelaku usaha dalam program ini. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan KUR dan meningkatkan akses informasi bagi UMKM.

2.1.4.2 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan adalah transfer pendanaan antar pihak atau merealisasikan rencana investasi, baik yang dilaksanakan sendiri dan/atau lembaga (Hia *et al.*, 2021). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 193/PMK.05/2020, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ini ditujukan bagi Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan usaha ultra mikro yang tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang UMKM yang tercatat dalam SIKP untuk mempermudah dan mempercepat proses penjaminan modal agar dapat memperlebar peluang usaha.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, pemerintah menetapkan

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai koordinator Pembiayaan UMi yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana. BLU PIP merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pembiayaan UMi disalurkan oleh BLU PIP melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM minimal 2 tahun, sehat dan berkinerja baik, serta memiliki sistem yang dapat terkoneksi dengan SIKP UMi yang digunakan oleh BLU PIP, seperti PT. Pegadaian Persero, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT. Bahana Artha Ventura (BAV). Dalam pelaksanaan Pembiayaan UMi, BLU PIP bekerja sama baik kerja sama pendanaan maupun program dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, organisasi kemsayarakatan, penyalur, lembaga linkage, dan pihak swasta lainnya.

Penyalur tersebut memiliki berbagai skema penyaluran yang diterapkan tanpa mensyaratkan jaminan, memberi akses kepada pengusaha ultra mikro untuk mendapatkan pinjaman, mendampingi dan menguatkan debitur untuk menekan *Non Performing Loan* (NPL) (Hia *et al.*, 2021). Menurut Rewilak (2017) risiko NPL tidak hanya ditekan dengan menggunakan jaminan, tetapi juga melalui pendekatan persuasif, tanggung renteng dalam kelompok ibu, serta sistem angsuran. LKBB kemudian menyalurkan dana kepada pelaku usaha melalui koperasi, sehingga cakupan wilayah pembiayaan UMi menjadi lebih luas dan lebih dekat dengan masyarakat. Skema ini sejalan dengan hasil penelitian yang

akan bahwa jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat memiliki positif dan signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.



Pembiayaan UMi menawarkan sejumlah keuntungan bagi UMKM, termasuk proses pengajuan yang mudah dan kriteria yang tidak terlalu ketat, sehingga memungkinkan lebih banyak UMKM yang dapat memperoleh pembiayaan. Kedua, suntikan modal tambahan memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan produk baru. Ketiga, peningkatan pendapatan UMKM yang difasilitasi oleh suntikan modal akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan karyawan. Keempat, pertumbuhan bisnis membutuhkan perekrutan tenaga kerja tambahan, sehingga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Pembiayaan UMi telah mengembangkan skema pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nasabah dan inklusif untuk berbagai kondisi. Sebagai gambaran, PT Permodalan Nasional Madani menyalurkan Pembiayaan UMi dengan sebutan “program Mekaar”. Program ini menargetkan perempuan prasejahtera yang berkelompok dan membutuhkan pertemuan rutin. Selain itu, PT Bahana Artha Ventura juga menyalurkan Pembiayaan UMi melalui koperasi, salah satunya Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), yang lebih banyak memberikan pinjaman kepada perempuan (Hia *et al.*, 2021). Terdapat beberapa alasan mengapa KOMIDA lebih fokus pada debitur perempuan. Pertama, perempuan dianggap lebih rajin dan teliti dalam mengembalikan pinjaman. Kedua, perempuan memiliki strategi yang lebih baik dalam menghadapi kemiskinan. Ketiga, perempuan lebih fokus pada keluarga dan keberhasilan anak mereka.

Terlepas dari berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh program UMi, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah tingkat literasi keuangan yang relatif rendah di kalangan

UMKM, yang dapat menghambat pemanfaatan pembiayaan secara optimal. Sementara itu, seperti halnya KUR, mayoritas pembiayaan UMi diserap



oleh sektor perdagangan. Mengingat sektor perdagangan merupakan kontributor utama PDB di Indonesia, akan lebih bijaksana jika para pembuat kebijakan memprioritaskan penyaluran pembiayaan UMi kepada pengusaha industri mikro dan kecil. Selain itu, jumlah pembiayaan maksimal Rp.20 juta per debitur. Hal ini berbeda dengan kredit perbankan lainnya, seperti KUR, yang jumlah pinjamannya dapat mencapai Rp.25 juta hingga Rp.500 juta.

Berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan, terdapat beberapa langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan program ini yaitu melalui peningkatan akses informasi mengenai program UMi, pengembangan sistem teknologi informasi untuk mempercepat pengajuan dan pencairan pembiayaan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM. Keberhasilan program UMi tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi UMKM, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Belanja Pemerintah dengan Pengangguran dan Kemiskinan

Menurut Keynes, peningkatan belanja pemerintah akan meningkatkan output perekonomian. Belanja pemerintah tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Pegawai merupakan bentuk transfer dari pemerintah ke masyarakat, khususnya pegawai pemerintah, sehingga meningkatkan *disposable income* yang meningkatkan konsumsi di masyarakat dan berimplikasi positif bagi penurunan angka kemiskinan (Mahmud *et al.*, 2024).



Belanja modal seperti pembangunan infrastruktur jalan berdampak pada tan mobilitas barang dan jasa serta kegiatan ekonomi masyarakat, yang

kemudian dapat mengurangi kemiskinan Amri (2022). Belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengangguran, di mana ketika belanja pemerintah meningkat maka pengangguran akan turun (Kaharudin *et al.*, 2019). Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran pemerintah untuk belanja barang dan jasa dapat merangsang penciptaan lapangan kerja baru serta mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Sementara itu menurut Dahmardeh & Tabar (dalam Mahmud *et al.*, 2024) belanja pemerintah berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Iran dan bahwa belanja kontruksi memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2017) menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, infrastruktur jalan, dan irigasi berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, Miar dan Yunani (2020) dalam studi mereka menyimpulkan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak yang langsung dan signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Mereka juga menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap penurunan kemiskinan melalui variabel pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Hubungan antara Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Pengangguran dan Kemiskinan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dirancang untuk peningkatan akses modal bagi pelaku usaha kecil, yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Akses terhadap KUR dapat meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan pelaku usaha, yang

berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di masyarakat. Menurut Subkhan (dalam Mahmud *et al.*, 2024), dampak program penjaminan kredit pemerintah



terhadap masyarakat miskin menunjukkan bahwa program tersebut memberikan dampak positif terhadap kemungkinan penurunan kondisi kemiskinan di Indonesia. Selain itu, melalui KUR, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperluas usaha mereka, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru.

KUR tidak hanya berfokus pada pemberian pinjaman, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan. Hidayat (2020) menekankan bahwa program KUR yang disertai dengan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan wirausaha, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta mengurangi kemiskinan. KUR juga memberikan dampak sosial yang positif, di mana penerima KUR mengalami peningkatan dalam kualitas hidup. Dengan demikian, KUR berperan penting dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan akses modal, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan dampak sosial yang luas.

Pengembangan UMKM diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan sektor ini diyakini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat (Nursini, 2020). Namun, salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan modal. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap kredit perbankan. Akses ke lembaga keuangan ini tidak hanya berguna untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan pelaku usaha, yang dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan.

2.2.3 Hubungan antara Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan Pengangguran dan Kemiskinan



embiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program yang dirancang untuk <an akses pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro. Program ini

bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Usaha ultra mikro sering kali dijalankan oleh masyarakat yang berada di garis kemiskinan, sehingga akses terhadap pembiayaan sangat penting bagi mereka. Melalui pembiayaan UMi, pelaku usaha dapat memperoleh dana untuk modal kerja, pengembangan usaha, dan perbaikan infrastruktur usaha mereka.

Dengan meningkatnya pendapatan dan produktivitas usaha ultra mikro melalui pembiayaan UMi, diharapkan akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di masyarakat. Semakin tinggi penyaluran pembiayaan UMi, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang dapat dicapai. Félix *et al.* (dalam Mahmud *et al.*, 2024) meneliti penyaluran kredit mikro di 11 negara berkembang dan membuktikan bahwa kredit mikro memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, tenaga kerja dan pendidikan juga berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, menurut Hia (2021), program UMi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan produksi sektor UMKM.

2.3 Tinjauan Empiris

Juniarto & Muchlisoh (2019) tentang Pengaruh Kredit UMKM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pemberian kredit UMKM dapat berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode regresi data panel dengan model FEM SUR, ditemukan bahwa pemberian kredit UMKM secara signifikan berhasil menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Barat.



Ifa, M., *et al.*, (2020) tentang Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian

ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah *purposive sampling*. Adapun informannya terdiri dari pejabat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar, dan pengembangan usaha mikro tersebut berdampak positif pada penanggulangan kemiskinan.

Huda, I. U., *et al.*, (2021) tentang peran Belanja Daerah sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pegawai antara tahun 2012-2019 belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin. Selain itu, belanja barang dan jasa selama periode yang sama juga tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan. Begitu pula, belanja modal dalam rentang waktu tersebut belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Di sisi lain, belanja pegawai antara tahun 2012-2019 tidak memberikan dampak positif terhadap pengangguran, sementara belanja barang dan jasa selama periode tersebut terbukti efektif dalam mengurangi angka pengangguran. Namun, belanja modal antara tahun 2012-2019 juga tidak mampu menurunkan angka pengangguran di Kota Banjarmasin.

Hia, V. D. P., *et al.*, (2021) tentang Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil. Penelitian ini menerapkan metode regresi dan analisis jalur dengan menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2017-2018 dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh

aan Ultra Mikro terhadap pertumbuhan ekonomi regional serta
 ihan produksi industri mikro dan kecil di tingkat provinsi. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang diukur dengan PDRB.

Akhmad *et al.*, (2022) tentang *Effectiveness of Regional Government Expenditure in Reducing Unemployment and Poverty Rate*. Penelitian ini mengungkapkan efektivitas belanja pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Menggunakan data panel dari 24 kabupaten dan kota selama 2009-2018, analisis dilakukan dengan model ekonometrika. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi swasta signifikan menurunkan kemiskinan, sementara belanja modal meningkatkan investasi swasta. Jumlah penduduk juga berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Simulasi kebijakan menunjukkan bahwa peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal oleh pemerintah daerah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Amri (2022) tentang Pengaruh Belanja Pemerintah dan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Tingkat Kemiskinan: Peran Pengangguran sebagai Pemoderasi (Studi Komperatif Antar Wilayah Administratif Di Provinsi Sumatera Utara). Penelitian ini menggunakan data panel dari kedua wilayah tersebut selama periode 2010-2020 dan menerapkan analisis regresi berganda serta analisis regresi termoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah kota secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, sementara belanja modal pemerintah kabupaten tidak memberikan dampak yang sama. Belanja hibah dan bantuan sosial terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di kedua wilayah administratif. Penyaluran kredit

ecara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten, ak di wilayah kota. Selain itu, tingkat pengangguran berkontribusi pada



peningkatan kemiskinan di kedua wilayah, dan variabel makroekonomi ini juga memoderasi pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di wilayah kota, tetapi tidak di kabupaten.

Manguma *et al.*, (2023) tentang Analisis Kredit Usaha Rakyat terhadap Indikator Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis hubungan antara tren KUR dengan tren pengangguran, kemiskinan, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di wilayah Ajatappareng (yang meliputi Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Enrekang, Kab. Pinrang, dan Kota Pare-Pare), penyaluran KUR tidak berdampak pada tingkat pengangguran. Namun, KUR berpengaruh terhadap kemiskinan, kecuali di Kota Pare-Pare dan Kabupaten Enrekang. Sebaliknya, KUR memiliki dampak positif terhadap pendapatan per kapita di seluruh kabupaten di wilayah Ajatappareng, sementara dampaknya pada wilayah tersebut tidak signifikan, kecuali di Kabupaten Barru.

Sitanggang *et al.*, (2024) tentang Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Sumatera Utara (Tahun 2001-2021). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki kemampuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Sumatera Utara, di mana variabel pengangguran dan kemiskinan memberikan kontribusi sebesar 77,5 persen terhadap persentase belanja pemerintah di provinsi tersebut, sementara 22,5 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.



Mahmud *et al.*, (2024) tentang Analisis Dampak Pembiayaan Usaha Mikro, dan Menengah (UMKM) dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat

Kemiskinan di Sulawesi Selatan Periode 2017 s.d. 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal melalui belanja APBN, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Metode yang digunakan adalah analisis data panel dengan total 120 observasi, yang merupakan gabungan data cross section dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan data time series selama tahun 2017 hingga 2022. Metode regresi yang diaplikasikan adalah Random Effect Model (REM), yang juga dikenal sebagai Error Component Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang dianalisis memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

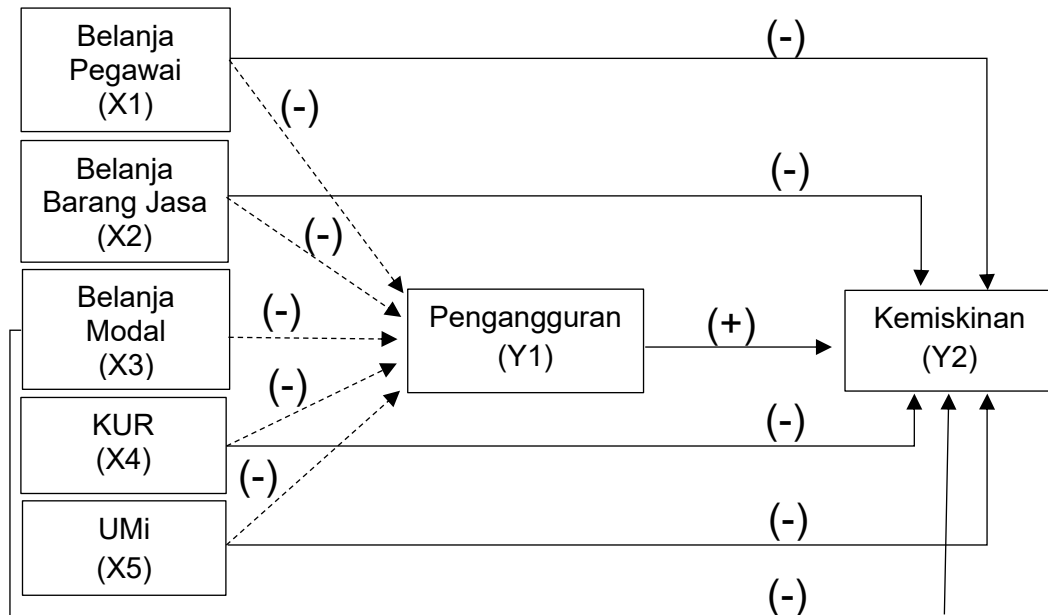
Aluko *et al.*, (2024) tentang *The Impact of Government Microfinance Program on Poverty Alleviation and Job Creation in a Developing Economy*. Studi ini bertujuan menyelidiki pengaruh *South African Microfinance Apex Fund (SAMAF)* terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini melibatkan 103 perusahaan penerima manfaat dan wiraswasta melalui kuesioner. Analisis data dilakukan secara eksploratif dan deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa 87 persen responden merasa pinjaman yang diterima cukup untuk kebutuhan bisnis mereka, dan mereka berhasil menciptakan setidaknya satu pekerjaan sampingan serta meningkatkan pendapatan usaha setelah menerima pinjaman.

2.4 Kerangka Pemikiran

Variabel pada penelitian ini terdiri dari kemiskinan (Y2) sebagai variabel dependen, kemudian belanja pemerintah sebagai variabel independen yang meliputi Belanja Pegawai (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), dan Belanja 3). Selanjutnya, Penyaluran KUR (X4) dan Pembiayaan UMi (X5) sebagai



variabel independen lainnya. Penelitian ini juga menggunakan variabel perantara berupa Pengangguran (Y1). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

_____ : pengaruh langsung

----- : pengaruh tidak langsung

Belanja pemerintah tersebut bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong daya beli yang akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi adalah bentuk program yang dirancang oleh pemerintah untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM. Intervensi pemerintah tersebut dilakukan dengan asumsi jika masyarakat memiliki akses modal yang lebih baik maka akan dapat mengembangkan

dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.



2.5 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini mengusulkan hipotesis negatif dengan asumsi bahwa peningkatan dalam kelima variabel tersebut akan berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran. Peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Penyaluran KUR yang lebih besar ditujukan untuk mendukung UMKM karena berpotensi menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian pula, pembiayaan UMi, memungkinkan masyarakat untuk memulai atau mengembangkan usaha, yang kemudian dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Dengan demikian, hipotesis ini mencerminkan keyakinan bahwa intervensi melalui belanja pemerintah dan program pembiayaan dapat secara signifikan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dengan mengurangi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diduga belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.
2. Diduga belanja barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.
3. Diduga belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.
4. Diduga penyaluran KUR berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.



5. Diduga pembiayaan UMi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran.